

Soal Trotoar Simpang Santa, Semua Pihak Diminta Sabar Tunggu Evaluasi

JAKARTA (IM) - Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta masyarakat bersabar menunggu hasil evaluasi uji coba rekayasa lalu lintas kawasan Simpang Santa Jakarta Selatan.

Heru menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan mengedepankan kenyamanan bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. Pihaknya, lanjut Heru, sudah memerintahkan dinas terkait untuk maraton menuntaskan jalur lalu lintas di kawasan tersebut.

"Saya harap masyarakat bisa bersabar saja dulu, dinas terkait lagi kerja (jalur Simpang Santa) agar bisa digunakan dengan nyaman. Prinsipnya untuk kenyamanan seluruh masyarakat pengguna jalan," ujar Heru, Rabu (19/4).

Terkait dengan polemik belakangan ini, Heru menganggap bahwa hal tersebut wajar lantaran dalam setiap kebijakan akan selalu menaui pro dan kontra. Namun, kata Heru, Pemprov DKI berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua warganya.

Ditanya perihal kesibukan menjelang Lebaran, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI itu mengungkapkan bahwa saat ini dirinya juga tengah fokus menghadapi persiapan Hari Raya Idul

Fitri seperti meninjau ketersediaan pangan di sejumlah pasar guna menjamin kebutuhan masyarakat.

"Monitor persiapan untuk kelancaran mudik, ketersediaan pangan, daging dan lain lain. Lebaran kan semua masyarakat harus bergembira ya," katanya.

Sebagai informasi, dalam merespon berbagai masukan soal kemacetan di simpang Santa, Pemprov DKI pun sudah melakukan Penyesuaian guna meminimalisasi masalah tersebut.

"Salah satu penyesuaian membuka barrier beton yang kemarin digunakan untuk menutup ruas jalan tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).

Syafrin juga mengatakan pihaknya sudah memasang alat kontrol pengatur lalu lintas untuk penyeberangan jalan (pelican crossing) yang nantinya akan diatur siklus waktunya.

Lalu, layanan bus TransJakarta yang sebelumnya belok ke Jalan Wolter Monginsidi akan kembali masuk ke arah Tendean.

"Begitu juga kita akan melakukan penataan parkir di kawasan Jalan Suryo, Jalan Wolter Monginsidi dan juga Senopati," katanya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PERMINTAAN EXTRA FLIGHT MENCAPI SERIBU LEBIH PENERBANGAN

Dua pesawat siap lepas landas dan mendarat di runway Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (19/4). PT Angkasa Pura II cabang bandara Soekarno Hatta telah menerima permintaan ijin "Extra Flight" atau penambahan penerbangan dari berbagai maskapai sebanyak 1.216 penerbangan dan sudah terealisasi sebanyak 400 penerbangan tambahan yang digunakan selama angkutan Lebaran 2023 lewat bandara Soekarno Hatta.

200 Ribu NIK Non-DKI Dinonaktifkan Pemprov Mulai Agustus 2023

Seluruh instansi pemerintah mulai dari provinsi, kota, wilayah, serta Kepolisian dan Pengadilan Negeri juga akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK ini. Bagi warga yang punya NIK tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan tersebut dapat mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.

JAKARTA (IM) - Sebanyak hampir 200 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta milik penduduk nonaktif bakal dinonaktifkan Pemprov DKI Jakarta pada Agustus 2023.

Menurut temuan sejauh

ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut terdapat 194.777 penduduk nonaktif di DKI.

Dalam sosialisasi tertib administrasi kependudukan

dan pendataan arus mudik/balik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (18/4) kemarin, Budi menjelaskan bimbingan teknis kepada masyarakat bakal diadakan pada bulan Mei hingga Juli 2023.

"Bimbingan teknis akan dilakukan kepada setiap kelurahan oleh kabupaten/kota terkait. Jadi paparan materinya bisa lebih menjangkau semua masyarakat," ujar Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi mengungkap sejumlah alasan utama banyaknya penduduk yang ditemukan nonaktif.

Menurut dia, alasan terbanyak adalah penduduk tidak diketahui keberadaannya. Kemudian ada yang sudah

pindah ke luar DKI, tapi dokumen kependudukannya masih di DKI.

"Jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk nonaktif yang ada," kata Budi.

Budi mengatakan penonaktifan NIK itu memiliki beberapa manfaat, yakni untuk ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi rugi keuangan daerah, mengurangi potensi golput, dan menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh masyarakat.

Ia menyebut seluruh instansi pemerintah mulai dari provinsi, kota, wilayah, serta Kepolisian dan Pengadilan Negeri juga akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK ini.

Budi menyebut, warga yang punya NIK tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan tersebut dapat mendatangi pos pengaduan

yang tersedia di setiap kelurahan.

"Dengan prosedur yang sudah ditetapkan, keluhan masyarakat akan kami proses. Jadi silakan, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi boleh mendatangi kelurahan terdekat," tutur Budi.

Sementara itu, Budi mengungkap tren angka statistik urbanisasi dari luar DKI Jakarta adalah 80 persen pendatang berpendidikan SLTA ke bawah.

Sebanyak 40-50 persen dari pendatang itu berpenghasilan rendah. Adapun 20 persen pendatang tersebut tinggal di wilayah Rukun Warga (RW) yang termasuk kumuh.

"Padahal 80 persennya usia produktif," kata Budi.

Budi mengungkap khawatir mengenai kemudahan urusan perizinan kemudian menyebabkan penyalahgunaan KTP. ● yan



ARUS MUDIK DI TERMINAL PULO GEBANG Para calon penumpang menunggu jam keberangkatan bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu (19/4).

5 Karakteristik Pasien Kasus Covid-19 Arcturus di Jakarta

JAKARTA (IM) - Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunitas Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama menjelaskan lima karakteristik pasien kasus subvarian Omicron XBB.1.16 yang dikenal dengan nama arcturus di Jakarta. Lima pasien tersebut terdiri dari empat orang perempuan dan satu orang pria.

Ia mengatakan tiga orang berusia 20-40 tahun, satu orang usia 56 tahun, dan satu orang usia 74 orang yang mayoritas mengeluhkan gejala baru, yaitu mata merah, perih, keluar kotoran mata atau belek.

"Empat orang bergejala ringan, satu orang dirawat di rumah sakit dengan gejala sedang (pneumonia) dirawat selama 6 hari dan sudah sembuh saat ini (kondisi baik)," kata Ngabila melalui keterangan tertulis, Rabu (19/4).

Selanjutnya, satu pelaku perjalanan luar negeri dari India dan empat lainnya transmisi lokal di komunitas Jakarta. "Empat pasien sudah sembuh dan satu pasien masih isoman. Kelimanya sudah vaksinasi tiga kali," katanya.

Ngabila meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran Covid-19 di periode lebaran dengan disiplin bermasker terutama saat sedang sakit/tidak enak badan, bertemu orang sakit, dan di transportasi umum atau di perjalanan mudik.

Ia mengimbau pula agar masyarakat men-

jaga stamina baik dengan makan, tidur, istirahat cukup, jangan kecapekan, dan tidak stress. "Untuk yang memiliki penyakit komorbid terus dibawa obatnya terutama saat mudik. Pastikan jumlahnya cukup dan tidak habis selama mudik. Obat diminum teratur," ucap dia.

Komorbid yang menyebabkan kematian tinggi pada Covid-19, kata Ngabila, adalah penyakit paru kronik, kanker, penyakit ginjal kronik; diabetes mellitus (Tipe 1 & 2), stroke, HIV atau TBC, Talasemia, serta Autoimun.

"Berikutnya, kondisi dan kebiasaan adalah hamil, obesitas, lansia dan usia di atas 40 tahun, perokok/pernah merokok," tuturnya.

Ngabila mengimbau warga untuk melengkapi vaksinasi Covid-19 dan melakukan deteksi dini jika memiliki gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, mata merah atau belekan. "Juga pada kontak erat kasus positif yang memiliki risiko tinggi tertular. Pemeriksaan PCR dan antigen gratis di Puskesmas Jakarta terdekat dan mengontrol komorbid dengan minum obat rutin yang biasa dikonsumsi," tuturnya. ● yan

Awas! Banyak Lubang di Jalur Pantura Kota Bekasi

BEKASI (IM) - Memasuki H-3 Idul Fitri 2023, kendaraan pemudik sudah memenuhi jalur Pantura tepatnya Jl Sultan Agung, Kota Bekasi. Iring-iringan kendaraan roda dua dan empat berjalan perlahan dari arah Jakarta menuju wilayah Tambun, Cikarang, Karawang, Bandung Jawa Barat dan sekitarnya.

Jalur Pantura Kota Bekasi ini menjadi pilihan bagi para pemudik khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua. Meski demikian banyak juga kendaraan roda empat memilih jalur tersebut demi menghindari beban biaya tol dan kepadatan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek), Cikopo-Palimanan (Cipali) dan tol-tol luar kota lainnya menuju wilayah Jawa.

Dari pantauan Rabu (19/4) pukul 11.39 WIB, setiap kendaraan roda dua yang melintas di jalur arteri Kota Bekasi terlihat penuh membawa barang

bawaannya. Barang-barang ini, mereka setting di depan dan belakang kendaraan menggunakan kayu atau bambu sebagai penyangga barang bawaan.

Supaya menarik perhatian pengendara lain di belakangnya, pemilik kendaraan menuliskan kata-kata unik di barang bawaannya yang dibungkus rapi. Dari kata dan bahasa yang ditulis di selembar kertas ini bisa mengetahui jati diri dan dari mana kampung asal mereka.

Di jalur arteri ini, pemudik yang menggunakan roda dua dan empat masih harus bersaing menguasai badan jalan dengan kendaraan besar sumbu tiga seperti truk, tronton dan kontainer. Karena sepanjang jalur arteri Kota Bekasi, kendaraan sumbu tiga ini masih bebas melintas, terkadang kendaraan ini putar balik sehingga menyebabkan penumpukan kendaraan.

Selama melintas jalur arteri Kota Bekasi, para

pemudik perlu hati-hati, karena ketika sudah memasuki perbatasan Jakarta Timur-Bekasi, tepatnya di daerah Bintara banyak badan jalan yang sudah rusak. Seperti badan jalannya sudah retak, aspalnya mengelupas bahkan ada yang berlubangnya cukup besar dan dalam.

Sepanjang jalan perbatasan Jakarta-Bekasi seperti di Jl Gusti Ngurah Rai tepatnya di depan Pasar Bintara dekat Stasiun Cakung, Jl Jenderal Sudirman, Kranji, Jl Sultan Agung, Jl Ahmad Yani sampai persimpangan di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi banyak jalan yang sudah rusak dan belum diperbaiki. Berdasarkan pantauan, ada beberapa titik jalan rusak sudah ada yang ditambal dan mengelupas kembali. Jadi saat ini, kondisinya lebih banyak jalan rusak dan berlubang daripada jalan yang sudah ditambal. Karenanya pemudik diminta berhati-hati. ● yan



PREDIKSI PUNCAK ARUS MUDIK 2023

Sejumlah pemudik membawa barang bawaannya menuju bus di Terminal Pondok Pinang, Jakarta, Rabu (19/4). Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik lebaran 2023 akan terjadi pada Rabu (19/4/2023) malam hingga Kamis (20/4).

Heru Budi Akan Cek Reklamasi di Gugus Pulau Pari yang Diprotes Warga

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan melihat aktivitas reklamasi di Pulau Tengah usai disorotan organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta bersama Forum Peduli Pulau Pari (FP3). Reklamasi itu dilakukan pengembangan di Pulau Tengah yang berada dalam Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan.

"Nanti ke sana aja, kita lihat ke sana," kata Heru Budi usai meninjau ketersediaan stok daging menjelang Hari Raya Idul Fitri di PD Dharma Jaya, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Sebelumnya, WALHI Jakarta bersama Forum Peduli Pulau Pari (FP3) melayangkan surat kepada Pemprov DKI untuk mengambil tindakan tegas atas aktivitas reklamasi di Pulau Tengah. "Pembangunan yang dilakukan Pulau Tengah sudah tidak wajar," kata Ketua FP3 Mustaghfirin dalam rilis bersama Walhi DKI.

Mustaghfirin mengatakan, reklamasi sebagai strategi pembangunan pada lahan terbatas di pesisir dan laut telah memberikan pengalaman buruk dalam sejarah pengelolaan lingkungan hidup di Jakarta.

Kerusakan ekosistem dan terganggunya mata pencaharian nelayan merupakan dampak nyata yang harus dibayar mahal di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin cepat.

"Mereka sudah merusak ekosistem perairan dan merampas ruang yang menjadi kehidupan masyarakat, seperti nelayan laut dangkal, pembudidaya tambak, dan pembudidaya rumput laut. Meski begitu, pemerintah masih saja diam," ujarnya.

Sementara itu, WALHI Jakarta mengatakan rusaknya ekosistem perairan akibat reklamasi Pulau Tengah mengindikasikan kemungkinan adanya tindak kejahatan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada pembangunan Pulau Tengah yang mengorbankan ekosistem yang ada.

Pengkampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah, menyampaikan ekosistem tersebut memiliki nilai penting bagi kelangsungan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. "Aktivitas reklamasi Pulau Tengah telah merusak ekosistem perairan termasuk padang lamun," ucap dia.

Menurut dia, dalam Undang-undang No.1 Tahun 2014 pengrusakan padang lamun merupakan tindak pidana.

WALHI Jakarta menilai kerusakan ekosistem tersebut tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam pemberian izin pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah dengan mudah memberikan izin lokasi dan pengelolaan tanpa memperhatikan dampak buruk, baik bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

Menurut WALHI Jakarta, pemberian izin pada reklamasi Pulau Tengah di Kepulauan Seribu sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap keadilan ekologis. Sebab, dalam kasus reklamasi tersebut, lingkungan dan masyarakat menjadi korban utama atas pembangunan pulau wisata mewah yang hanya bisa diakses segelintir orang. "Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan desakan kami. Respon pemerintah akan menunjukkan kepada siapa pemerintah berpihak," kata Aminullah. ● yan